

Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri

Carolina Novithasari^{1*}, Setyaningsih SU²

Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Slamet Riyadi, Kota Surakarta, Indonesia^{1, 2}

*Email Korespodensi: carolinaanovithasari@gmail.com

Diterima: 03-09-2025 | Disetujui: 14-09-2025 | Diterbitkan: 16-09-2025

ABSTRACT

This study was designed to empirically examine the influence of the village financial system, transparency, and the Government Internal Control System (SPIP) on the accountability of village fund management in the village government of Jatipurno Subdistrict, Wonogiri Regency. The research methodology used was a quantitative survey with primary data sources. A sample of 45 respondents was obtained through purposive sampling, and a questionnaire instrument was used for data collection. Data analysis techniques included multiple linear regression and hypothesis testing (t-test and F-test). The results of the study concluded as follows: (1) The village financial system, transparency, and SPIP individually proved to have a significant effect on the accountability of village fund management. (2) The value of the coefficient of determination (Adjusted R²) was 0.777, indicating that 23.3% of the variation in the dependent variable was explained by the independent variables.

Keywords: Village financial system; Transparency; Government internal control system (SPIP); Accountability in village fund management

ABSTRAK

Penelitian ini dirancang untuk menguji secara empiris pengaruh sistem keuangan desa, transparansi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri. Metodologi penelitian yang digunakan adalah survei kuantitatif dengan sumber data primer. Sampel sebanyak 45 responden diperoleh melalui teknik purposive sampling, dan instrumen kuesioner digunakan untuk pengumpulan data. Teknik analisis data mencakup regresi linier berganda dan uji hipotesis (Uji t dan Uji F). Hasil penelitian menyimpulkan sebagai berikut: (1) Sistem keuangan desa, transparansi, dan SPIP secara individual terbukti berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. (2) Nilai koefisien determinasi (Adjusted R²) sebesar 0,714, yang berarti kontribusi simultan dari ketiga variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 71,4%, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Katakunci: Sistem keuangan desa ; Transparansi ; Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) ; Akuntabilitas pengelolaan dana desa

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Carolina Novithasari, & Setyaningsih SU. (2025). Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri. PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, 3(1), 828-842. <https://doi.org/10.62710/b43yqz77>

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa) menyatakan bahwa dana desa dialokasikan untuk desa melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.



Gambar 1. Grafik Perkembangan Dana Desa Tahun 2015-2024

(Sumber: <https://djp.kemenkeu.go.id>, 2025)

Merujuk pada data yang dipublikasikan oleh Kementerian Desa PDTT, alokasi dan realisasi dana desa menunjukkan tren peningkatan selama periode 2015–2024, dengan satu pengecualian pada tahun 2022. Pada tahun 2015, penyerapan dana desa tercatat sebesar 82,72% dari total pagu Rp 20,7 triliun. Angka ini meningkat signifikan pada tahun 2016 menjadi Rp 47 triliun dengan tingkat serapan 97,65%. Alokasi dana kemudian berada pada level Rp 60 triliun selama tahun 2017-2018, dan terus menunjukkan kenaikan pada tahun 2019 (Rp 70 triliun), 2020 (Rp 71,2 triliun), dan 2021 (Rp 72 triliun). Pada tahun 2022, terjadi penurunan alokasi menjadi Rp 68 triliun yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah untuk memfokuskan anggaran pada program BLT guna mitigasi dampak pandemi COVID-19. Tren alokasi kembali normal pada tahun 2023 (Rp 70 triliun) dan terus meningkat pada tahun 2024 (Rp 71 triliun).

Qiroatul Afrilia et al, (2024) menyatakan bahwa pengelolaan dana desa harus dilaksanakan berdasarkan akuntabilitas yaitu pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan kewenangan yang dimilikinya terhadap pihak-pihak yang menyusun anggaran. Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mengatur tentang asas akuntabilitas penyelenggara negara bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam konteks pengelolaan dana desa, asas akuntabilitas ini mengharuskan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan kepada masyarakat. Dimuat dalam situs (gorontalo.bpk.go.id).

Fenomena akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan dana desa, dimana informasi terkait perencanaan, penggunaan, dan pelaporan sering kali tidak disampaikan

dengan jelas kepada masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan kecurigaan atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Untuk itu dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa, maka diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, baik atas keuangan, kinerja, maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (www.bpkp.go.id). Akuntabilitas adalah proses mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya atau dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan secara periodik (Noordiawan, 2006: 34). Pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan dana desa yang telah diterima dengan baik, dengan menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan baik, agar dana desa dapat digunakan dengan maksimal, dan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa digunakan untuk mengurangi kecurangan dan membantu warga mengawasi pengelolaan dana desa. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah), sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban. Desa memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses pemerintahan, termasuk pembangunan, dalam sistem pemerintahan saat ini. Ini semua dilakukan sebagai bukti bahwa pemerintahan daerah mendukung otonomi daerah.

Dalam proses pertanggungjawaban pemerintah desa diharapkan dapat menggunakan teknologi informasi untuk membuat anggaran desa menjadi lebih transparan dan akuntabel. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor yang pertama adalah dengan penggunaan teknologi informasi. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) meneguhkan tekad untuk mengawal keuangan desa agar proses pembangunan desa lebih akuntabel sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri membuat aplikasi keuangan desa yang disebut Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Tujuan dari aplikasi Siskeudes menerapkan teknologi informasi dan konsep akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa untuk membuat pelaporan keuangan lebih mudah, memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan dengan baik, dan juga berfungsi sebagai pengendali pengelolaan keuangan desa untuk meningkatkan akuntabilitas (Mega et al. 2022).

Transparansi merupakan pilar esensial dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Prinsip ini menuntut pemerintah desa untuk bertindak sesuai regulasi dan komitmen terhadap masyarakat (Saputra et al., 2024). Transparansi, yang dimaknai sebagai keterbukaan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan (Mualifu et al., 2019), diwujudkan melalui akses informasi yang jelas mengenai seluruh siklus pengelolaan dana desa. Menurut Ula (2023), efektivitas akuntabilitas bahkan bergantung pada aksesibilitas dan keterbacaan laporan keuangan. Dengan demikian, praktik transparansi tidak hanya berfungsi untuk membangun kepercayaan publik, tetapi juga sebagai instrumen preventif yang krusial untuk meminimalkan risiko penyelewengan dan korupsi (DJPB, 2024).

Faktor ketiga dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) . Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) merupakan sistem yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala desa mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di

lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya. Sistem pengendalian internal memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses pelaksanaan pemerintah desa (Pemdes) dalam mengelola dana desa. Menurut Arfiansyah (2020) sistem pengendalian diharapkan dapat mendeteksi sejak dini kemungkinan terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan negara. Sistem pengendalian internal memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Pemdes tetap sesuai dengan Undang-Undang (Tiarno dan Budiwitjaksono, 2023).

Sebagai bagian dari kebijakan fiskal nasional, pemerintah pusat setiap tahunnya menyalurkan alokasi dana desa kepada seluruh desa di Indonesia. Kecamatan Jatipurno di Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu wilayah penerima alokasi tersebut. Implementasi kebijakan ini menghasilkan distribusi dana yang tidak merata di tingkat lokal, di mana jumlah dana desa yang diterima oleh setiap desa di Kecamatan Jatipurno berbeda-beda, menciptakan variasi pagu anggaran di antara desa-desa tersebut.

Tabel 1. Rincian Dana Desa Kec. Jatipurno 2024-2025

No	Nama Desa	2024	2025
1	Giriyoso	Rp 896.120.000	Rp 915.884.000
2	Kopen	Rp 990.867.000	Rp 994.724.000
3	Jatipurwo	Rp 956.840.000	Rp 961.490.000
4	Tawangrejo	Rp 964.950.000	Rp 993.980.000
5	Slogoretno	Rp 784.827.000	Rp 1.056.186.000
6	Kembang	Rp 1.092.084.000	Rp 1.032.074.000
7	Girimulyo	Rp 848.592.000	Rp 852.132.000
8	Jeporo	Rp 1.247.261.000	Rp 1.214.002.000
9	Mangunharjo	Rp 1.277.540.000	Rp 1.003.880.000

(Sumber: Kecamatan Jatipurno, 2025)

Tabel diatas merupakan rincian dana desa kec. Jatipurno tahun 2024-2025 yang diperoleh dari pemerintah pusat untuk merealisasikan tujuan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dari tabel diatas terlihat adanya perubahan nominal dana desa dari tahun 2024 ke tahun 2025. Beberapa desa mengalami peningkatan alokasi dana, sementara desa lainnya mengalami penurunan. Contohnya desa slogoretno mengalami peningkatan signifikan dari Rp 784.827.000 pada tahun 2024 menjadi Rp 1.056.186.000 pada tahun 2025, sementara desa mangunharjo mengalami penurunan dari Rp 1.277.540.000 menjadi Rp 1.003.880.000.

Perbedaan pagu anggaran dana desa yang diterima oleh setiap desa disebabkan oleh berbagai faktor, sebagaimana diidentifikasi oleh Martini, Lianto, dan S (2019), yang meliputi perencanaan program pembangunan, urgensi infrastruktur, komposisi demografis, dan prioritas kebijakan pemerintah daerah. Analisis terhadap pola distribusi ini merupakan langkah penting untuk menjamin bahwa penggunaan anggaran berdampak efektif pada pembangunan berkelanjutan. Salah satu contoh implementasi tata kelola yang baik dapat diamati di Kecamatan Jatipurno, di mana pemerintah desa setempat secara terbuka mempublikasikan anggaran pendapatan dan belanjanya di ruang publik, sehingga meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat luas.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif untuk menguji secara empiris hubungan antara variabel sistem keuangan desa, transparansi, dan SPIP dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini bergantung pada data primer yang dikumpulkan dari objek penelitian setelah memperoleh izin yang relevan. Populasi studi adalah 115 aparat pemerintah desa yang tersebar di 9 desa di wilayah Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri. Dari populasi tersebut, sampel sebanyak 45 responden dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria kesesuaian tertentu. Seluruh data kuantitatif yang terkumpul kemudian diolah melalui beberapa tahapan analisis statistik, yaitu: (1) Uji kualitas instrumen; (2) Uji asumsi klasik; dan (3) Analisis regresi linier berganda yang disertai dengan uji hipotesis (Uji t dan Uji F) serta analisis koefisien determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan Uji Instrumen Penelitian

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Sistem Keuangan Desa (X1)

Item Pernyataan	ρ -value	Kriteria (α)	Keterangan
X1.1	0,000	0,05	Valid
X1.2	0,000	0,05	Valid
X1.3	0,000	0,05	Valid
X1.4	0,000	0,05	Valid

(Sumber: Data primer diolah, 2025)

Tabel diatas menunjukkan bahwa item pernyataan X1.1 sampai dengan X1.4 diperoleh nilai signifikansi (ρ -value) = 0,000 < 0,05, maka semua item pernyataan variabel sistem keuangan desa valid.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Transparansi (X2)

Item Pernyataan	ρ -value	Kriteria (α)	Keterangan
X2.1	0,001	0,05	Valid
X2.2	0,001	0,05	Valid
X2.3	0,000	0,05	Valid
X2.4	0,000	0,05	Valid
X2.5	0,000	0,05	Valid

(Sumber: Data primer diolah, 2025)

Tabel diatas menunjukkan bahwa item pernyataan X2.1 sampai dengan X2.5 diperoleh nilai signifikansi (ρ -value) = 0,000 < 0,05, maka semua item pernyataan variabel transparansi valid.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (X3)

Item Pernyataan	ρ -value	Kriteria (α)	Keterangan
X3.1	0,000	0,05	Valid
X3.2	0,000	0,05	Valid
X3.3	0,000	0,05	Valid
X3.4	0,000	0,05	Valid
X3.5	0,000	0,05	Valid

(Sumber: Data primer diolah, 2025)

Tabel diatas menunjukkan bahwa item pernyataan X3.1 sampai dengan X3.5 diperoleh nilai signifikansi (ρ -value) = 0,000 < 0,05, maka semua item pernyataan variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) valid.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Item Pernyataan	ρ -value	Kriteria (α)	Keterangan
Y1	0,000	0,05	Valid
Y2	0,000	0,05	Valid
Y3	0,000	0,05	Valid
Y4	0,000	0,05	Valid
Y5	0,000	0,05	Valid
Y6	0,000	0,05	Valid
Y7	0,000	0,05	Valid

(Sumber: Data primer diolah, 2025)

Tabel diatas menunjukkan bahwa item pernyataan Y.1 sampai dengan Y.7 diperoleh nilai signifikansi (ρ -value) = 0,000 < 0,05, maka semua item pernyataan variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa valid.

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Cronbach Alpha	Nilai Kritis	Status
1	Sistem Keuangan Desa	0,781	0,60	Reliabel
2	Transparansi	0,812	0,60	Reliabel
3	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	0,718	0,60	Reliabel
4	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,854	0,60	Reliabel

(Sumber: Data primer diolah, 2025)

Hasil uji reliabilitas yang disajikan pada tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang memadai. Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai Cronbach's Alpha untuk setiap variabel yang lebih besar dari ambang batas yang ditetapkan yaitu 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan yang digunakan dalam instrumen ini adalah reliabel.

Hasil dan Pembahasan Uji Instrumen Penelitian

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	<i>Coefficients^a</i>					<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
	B	Std. Error	Beta				
1 (<i>Constant</i>)	3.637	2.426		1.499	.141		
Sistem Keuangan Desa (X1)	.667	.180	.423	3.701	.001	.497	2.013
Transparansi (X2)	.544	.141	.443	3.846	.000	.489	2.047
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (X3)	.217	.077	.230	2.815	.007	.977	1.024

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

(Sumber: Data primer diolah, 2025)

Hasil menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk variabel X1 (sistem keuangan desa) = 0,497, X2 (Transparansi) = 0,489 dan Variabel X3 (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)) = 0,977 > 0,10 dan nilai VIF untuk variabel X1 (sistem keuangan desa) = 2,013, X2 (Transparansi) = 2,047 dan Variabel X3 (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)) = 1,024 < 10, hal ini menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas atau model regresi tersebut lolos uji multikolinearitas.

Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi

<i>Runs Test</i>	
<i>Unstandardized Residual</i>	
<i>Test Value^a</i>	-.15959
<i>Cases < Test Value</i>	22
<i>Cases >= Test Value</i>	23
<i>Total Cases</i>	45
<i>Number of Runs</i>	23
<i>Z</i>	.000
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	1.000
a. Median	

(Sumber: Data primer diolah, 2025)

Hasil menunjukkan p-value (signifikansi) Asymp. Sig. (2-tailed) = 1,000 > 0,05 hal ini berarti tidak terjadi autokorelasi (bebas autokorelasi).

Tabel 9. Hasil Uji Heteroskedastisitas

		<i>Coefficients^a</i>				
		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.276	1.332		.958	.344
	Sistem Keuangan Desa (X1)	.149	.099	.319	1.506	.140
	Transparansi (X2)	-.129	.078	-.356	-1.664	.104
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (X3)	.047	.042	.169	1.118	.270

a. *Dependent Variable: ABS_RES*

(Sumber: Data primer diolah, 2025)

Hasil menunjukan bahwa p-value (signifikansi) untuk variabel X1 (sistem keuangan desa) = 0,140, X2 (Transparansi) = 0,104 dan Variabel X3 (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)) = 0,270 > 0,05, berarti tidak terjadi heteroskedastisitas (lolos uji heteroskedastisitas).

Tabel 10. Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		<i>Unstandardized Residual</i>
N		45
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	2.10005111
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.072
	<i>Positive</i>	.064
	<i>Negative</i>	-.072
<i>Test Statistic</i>		.072
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.200 ^{c,d}

a. *Test distribution is Normal.*

b. *Calculated from data.*

c. *Lilliefors Significance Correction.*

d. *This is a lower bound of the true significance.*

(Sumber: Data primer diolah, 2025)

Besarnya p-value (signifikansi) Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,200 > 0,05 artinya bahwa residual berdistribusi normal (lolos uji normalitas).

Hasil dan Pembahasan Teknik Analisis Data

Tabel 11. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

		<i>Coefficients^a</i>			
		<i>Unstandardized Coefficients</i>	<i>Standardized Coefficients</i>		
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	3.637	2.426		1.499
	Sistem Keuangan Desa (X1)	.667	.180	.423	3.701
	Transparansi (X2)	.544	.141	.443	3.846
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (X3)	.217	.077	.230	2.815

a. *Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)*

(Sumber: Data primer diolah, 2025)

Analisis regresi linier berganda menghasilkan model persamaan $Y = 3,637 + 0,667 X_1 + 0,544 X_2 + 0,217 X_3 + e$. Model ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen sistem keuangan desa (X_1), transparansi (X_2), dan SPIP (X_3) seluruhnya memiliki pengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Secara spesifik, dan dengan asumsi ceteris paribus, setiap peningkatan satu unit pada sistem keuangan desa akan meningkatkan akuntabilitas sebesar 0,667 unit, diikuti oleh transparansi (0,544 unit) dan SPIP (0,217 unit). Adapun nilai konstanta positif sebesar 3,637 merepresentasikan tingkat dasar akuntabilitas pengelolaan dana desa saat ketiga variabel prediktor dianggap tidak berpengaruh atau bernilai nol.

Tabel 12. Hasil Uji t

		<i>Coefficients^a</i>			
		<i>Unstandardized Coefficients</i>	<i>Standardized Coefficients</i>		
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	3.637	2.426		1.499
	Sistem Keuangan Desa (X1)	.667	.180	.423	3.701
	Transparansi (X2)	.544	.141	.443	3.846
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (X3)	.217	.077	.230	2.815

a. *Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)*

(Sumber: Data primer diolah, 2025)

Analisis Uji t dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa secara parsial. Hasilnya mengonfirmasi bahwa variabel Sistem Keuangan Desa (X_1) merupakan prediktor yang signifikan, dengan perolehan nilai p-value sebesar 0,001 ($p < 0,05$), sehingga hipotesis pertama (H_1) dapat diterima. Serupa dengan itu, variabel Transparansi (X_2) juga terbukti memiliki pengaruh yang sangat signifikan, ditunjukkan oleh nilai p-value 0,000, yang mendukung penerimaan hipotesis kedua (H_2). Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (X_3) turut menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik dengan nilai p-value sebesar 0,007 ($p < 0,05$),

Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri
(Novithasari, et al.)

yang mengarah pada penerimaan hipotesis ketiga (H_3). Secara kolektif, temuan ini menegaskan bahwa ketiga faktor yang diuji merupakan determinan penting yang secara individual memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri.

Tabel 13. Hasil Uji F (Uji Ketepatan Model)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	534.528	3	178.176	37.646	.000 ^b
	Residual	194.049	41	4.733		
	Total	728.578	44			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

b. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (X3), Sistem Keuangan Desa (X1), Transparansi (X2)

(Sumber: Data primer diolah, 2025)

Hasil perhitungan tabel ANOVA menunjukkan bahwa model regresi ini memiliki nilai F hitung 37,646 dengan nilai signifikansi (p. value) sebesar $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya model regresi tepat digunakan dalam memprediksi pengaruh variabel bebas X1 (sistem keuangan desa), X2 (transparansi) dan Variabel X3 (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)) terhadap Y (Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa).

Tabel 14. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.857 ^a	.734	.714	2.176

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (X3), Sistem Keuangan Desa (X1), Transparansi (X2)

(Sumber: Data primer diolah, 2025)

Hasil menunjukkan bahwa koefisien determinasi (adjusted R Square) untuk model ini adalah sebesar 0,714. Artinya besarnya sumbangan pengaruh variabel independen X1 (sistem keuangan desa), X2 (transparansi) dan Variabel X3 (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)) terhadap Y (Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa) sebesar 71,4 %. Sisanya ($100\% - 71,4\%$) = 28,6 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar model misalnya Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Komitmen Pemerintah Desa, Teknologi Informasi, dan lain-lain.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap

Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri
(Novithasari, et al.)

akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan p -value (signifikansi) = $0,001 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa “Sistem keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan jatipurno kabupaten wonogiri” terbukti kebenarannya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mega et al. (2022), Tiarno dan Budiwitjaksono (2023), Karim, Blongkod, dan Husain (2023) menyatakan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil ini sejalan dengan teori manajemen keuangan menurut Sunaryo (2021: 2), bahwa pengelolaan keuangan yang terencana, terorganisir, dan terkontrol akan meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dikembangkan oleh Kemendagri dan BPKP menjadi sarana penting dalam penerapan prinsip akuntabilitas. Aplikasi ini memungkinkan pencatatan transaksi secara tertib, pelaporan keuangan secara tepat waktu, dan pengawasan secara sistematis.

Secara teoritis, hasil ini mendukung *stewardship theory* (Donaldson & Davis, 1991) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah desa (*steward*) bertanggung jawab kepada masyarakat (*principal*) untuk mengelola keuangan desa secara jujur dan transparan demi kepentingan bersama. Sistem keuangan desa menjadi instrumen yang membantu mewujudkan akuntabilitas dengan menyediakan kontrol dan pelaporan yang memadai. Semakin optimal penerapan sistem keuangan desa, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan p -value (signifikansi) = $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga Hipotesis 2 yang menyatakan bahwa “Transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan jatipurno kabupaten wonogiri” terbukti kebenarannya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ula (2023), Saputra, Sekar Sari, dan Warisi (2024), Mualifu, Guspul, dan Hermawan (2019) menyatakan bahwa Transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2018) bahwa transparansi merupakan komponen utama dalam mewujudkan akuntabilitas publik. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah desa dan memberikan kontrol sosial atas penggunaan dana desa. Prinsip-prinsip akuntabilitas menurut LAN dan BPKP (2001) seperti intentions disclosure dan performance visibility juga relevan, karena mendorong keterbukaan pemerintah terhadap segala aktivitas pengelolaan dana desa. Ketika masyarakat diberikan akses terhadap informasi penggunaan dana desa melalui media seperti papan informasi, laporan keuangan terbuka, dan musyawarah publik, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan semakin meningkat dan berdampak positif terhadap akuntabilitas.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh

signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan $p\text{-value (signifikansi)} = 0,007 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga Hipotesis 3 yang menyatakan bahwa “Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan jatipurno kabupaten wonogiri” terbukti kebenarannya. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Karim, Blongkod, dan Husain (2023), Indriasih dan Sulistyowati (2022), Leoni et al. (2024) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil ini konsisten dengan teori Mulyadi (2017: 129) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern dirancang untuk menjaga aset, menjamin keandalan pelaporan keuangan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Hal ini relevan dengan teori stewardship (Donaldson & Davis, 1991) yang menganggap bahwa pengelola dana publik bertindak bukan semata-mata karena intensif atau kontrol eksternal, melainkan karena tanggung jawab moral untuk menjaga amanah masyarakat. Dalam kerangka teori ini, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) menjadi perwujudan dari komitmen dan integritas pengelola (steward) dalam memastikan bahwa setiap kegiatan keuangan dilakukan secara tertib, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) memberikan kerangka kerja yang memungkinkan para steward (pemerintah desa) mengelola dana desa dengan menjunjung tinggi nilai transparansi, akurasi, dan kepercayaan. Ketika pengendalian intern dijalankan dengan sungguh-sungguh, hal ini memperlihatkan bahwa pengelola benar-benar berorientasi pada kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi. Sehingga hal ini dapat memperkuat kesimpulan bahwa penerapan SPIP yang baik berkorelasi positif dengan meningkatnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, kesimpulan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pertama, Sistem Keuangan Desa secara empiris terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri.
2. Kedua, Transparansi teridentifikasi sebagai prediktor signifikan yang berkontribusi positif terhadap peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di lokasi penelitian.
3. Ketiga, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memainkan peran krusial dan terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Acha. 2018. "Tanya Jawab Siskeudes (Sistem Keuangan Desa)." 2018. <https://www.keuangandes.info/2018/12/tanya-jawab-siskeudes-sistem-keuangan-des.html>.
- Adha, Fadhlul. 2022. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan SDGs Di Desa Hulu Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan," 1–85.
- Anonim. 2024. *Pedoman Penyusunan Usulan Penelitian dan Skripsi Fakultas Ekonomi*, Unisri Press. Surakarta.
- Arfiansyah, Mufti Arief. 2020. "Pengaruh Sistem Keuangan Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Journal of Islamic Finance and Accounting* 3 (1).
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aulinnisa. 2022. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal)." *Jurnal Akuntansi Aktual* 6 (2): 334–44. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334>.
- Aziiz, Muhammad Nur. 2019. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa." *Jurnal Akuntansi Aktual* 6 (2): 334–44. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334>.
- Fajri, Ridha, dan Julita Julita. 2021. "Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Al-Iqtishad* 17 (2): 209. <https://doi.org/10.24014/jiq.v17i2.14463>.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Indriasih, Dewi, dan Wiwit Apit Sulistyowati. 2022. "The Role of Commitment, Competence, Internal Control System, Transparency and Accessibility in Predicting the Accountability of Village Fund Management." *The Indonesian Accounting Review* 12 (1): 73–85. <https://doi.org/10.14414/tiar.v12i1.2650>.
- Karim, Andriyawan E., Harun Blongkod, dan Siti Pratiwi Husain. 2023. "Pengaruh Sistem Keuangan Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)* 7 (1): 130–36. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.5963>.
- Karlinayani, Sri, dan Surasetyo Ningsih. 2018. "Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Pada Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Gayo Lues)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 3 (2): 1.
- Kurnianto, Sigit, Deddy Kurniawansyah, dan Wulandari Fitri Ekasari. 2019. "Menilai Keberhasilan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes): Validasi Model Keberhasilan Sistem Informasi Delone Dan Mclean." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga* 4 (2): 687–706. <https://doi.org/10.31093/jraba.v4i2.177>.
- Ladewi, Yuhannis, Taufiq Supriadi, Juska Meidy Enyke Sjam, * Welly, * Agista, and Hery Subowo. 2020. "The Effect of Accountability and Transparency of Village Fund Management." *The International Journal of Accounting and Business Society* 28 (2): 45–64. <https://doi.org/10.21776/ub.ijabs.2020.28.2.3>.
- Leoni, Prima Widitia, Wiwik Andriani, Armel Yentifa, dan Zahara Zahara. 2024. "The Effect of Clarity on Budgetary Targets and Internal Control on the Accountability of Village Fund Management." *Jurnal Riset Akuntansi Politala* 7 (1): 51–59. <https://doi.org/10.34128/jra.v7i1.270>.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Martini, R, N Lianto, dan Zulkifli Z S. 2019. "Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa." *Jurnal Akademik*.
- Mualifu, Ahmad Guspul, dan Hermawan. 2019. "Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten

- Purbalingga).” *Journal of Economic, Business and Engineering* 1 (1): 49–59.
- Mulyadi. 2017. *Sistem Akuntansi (Edisi Empat)*. Salemba Empat.
- Musdalifah. 2020. “Pengaruh Peran Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Temon.” *Jurnal Ilmu Akuntansi* 10: 278–88.
- Natania Mega, Katriyn, Lintje Kalangi, Peter M Kapojos, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, and Jl Kampus Bahu. 2022. “Pengaruh Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.” *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 17 (3): 150–61.
- Nugroho, Dr. Riant, dan Fire An Suprpto. 2021. *Manajemen Keuangan Desa Bagian 1:Konsep Dasar*. PT Elex Media Komputindo.
- “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa.” 2014. Jakarta.
- “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.” 2014. Jakarta.
- “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Ayat 19 Pasal 1 Dan 2.” 2014. Jakarta.
- “Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.” 2015. Jakarta.
- Raharjo, Eko. 2020. “(Agency Theory Vs Stewardship Theory in the Accounting Perspective).”
- Saputra, Yusranda, Meita Sekar Sari, dan Darwin Warisi. 2024. “Pengaruh Transparansi Dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan).” *Gedong Meneng*, no. 7: 35145. <https://djpb.kemenkeu.go.id>.
- Sugista, R. A. 2017. “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa.” *Jurnal Sosiologi*.
- Sunaryo. 2021. *Manajemen Keuangan Pertama*. Pasuruan: Qiara Media.
- Suriyanti, dan Fyrdha Faradyba Hamzah. 2023. *Buku Referensi Manajemen Keuangan*.
- Temalagi, Selva, dan Fanny Monica Anakotta. 2021. “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.” *Accounting Research Unit (ARU Journal)* 2 (1): 51–65. <https://doi.org/10.30598/arujournalvol2iss1pp51-65>.
- Tiarno, Sella Mahcica, dan Gideon Setyo Budiwitjaksono. 2023. “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip), Dan Penggunaan Siskeudes Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 7 (2): 1596–1608. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3015>.
- Ula, I S. 2023. “Pengaruh Digitalisasi, Transparansi Dan Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kabupaten Pati).” http://repository.unissula.ac.id/31871/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/31871/1/Akuntansi_31401900080_fullpdf.pdf.
- Umar, Husein. (2014). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta..
- “Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.” n.d.
- Watulinggas, Patricia, Lintje Kalangi, dan I Gede Suwetja. 2019. “Peranan Sistem Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Kapataran Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa).” *Indonesia Accounting Journal* 01 (02): 105–11.